

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI TERHADAP KONFLIK

NAGORNO-KARABAKH

Pada 27 September 2020, konflik Nagorno-Karabakh kembali pecah yang kemudian menambah rentetan lintasan sejarah dalam konflik tersebut. Konflik ini terjadi karena Armenia dan Azerbaijan saling melakukan penyerangan di wilayah Nagorno-Karabakh. Konflik Nagorno-Karabakh yang terjadi memicu aktor-aktor internasional untuk ikut terlibat dalam konflik tersebut. Turki dan Rusia menjadi salah satu aktor internasional yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh. Keterlibatan Turki dan Rusia di dalam konflik Nagorno-Karabakh berujung pada penyelesaian konflik tersebut. Untuk memahami hal ini, maka penelitian di dalam Bab II akan mendeskripsikan dinamika konflik Nagorno-Karabakh hingga pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Turki. Dengan demikian, penelitian di dalam bab ini akan diuraikan dalam beberapa anatomi.

Pada bagian pertama, penelitian ini akan memaparkan dinamika konflik Nagorno-Karabakh. Pada bagian ini akan dideskripsikan sejarah konflik Nagorno-Karabakh. Untuk bagian kedua, penelitian ini akan menguraikan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh yang pecah pada 27 September 2020. Lingkup dari aktor-aktor yang akan dibahas di dalam bagian tersebut ialah Turki dan Rusia. Untuk bagian ketiga, penelitian ini akan menjelaskan hubungan Turki dengan Armenia dan Azerbaijan. Terakhir, penelitian ini akan menerangkan lebih rinci terkait pengambilan kebijakan luar negeri Turki. Oleh karena itu, penelitian

ini akan mengelaborasi bagian-bagian tersebut dengan analisis dan data-data yang konkret guna menghasilkan suatu narasi yang ilmiah.

2.1 Dinamika Konflik Nagorno-Karabakh

Wilayah Armenia dan Azerbaijan, serta Nagorno-Karabakh terletak di Kaukasus Selatan. Dalam hal ini, Armenia dan Azerbaijan, serta wilayah Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia pada abad ke-19. Seiring berjalannya waktu, Armenia dan Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya pasca Kekaisaran Rusia runtuh pada tahun 1918 (Remler, 2016:1). Adanya kemerdekaan ini mendorong Armenia dan Azerbaijan memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Namun, kemerdekaan Armenia dan Azerbaijan tidak berselang lama karena Uni Soviet berhasil menaklukan kembali seluruh wilayah Kaukasus Selatan. Hal ini menyebabkan Armenia dan Azerbaijan, serta wilayah Nagorno-Karabakh dianeksasi ke dalam Uni Soviet pada tahun 1920 (Lorusso, 2016:3). Armenia dan Azerbaijan dimasukkan ke Uni Soviet dalam bentuk Republik. Sementara itu, wilayah Nagorno-Karabakh akan diatur status kedaulatannya oleh pemerintah Uni Soviet. Pada dasarnya, wilayah Nagorno-Karabakh merupakan wilayah yang dihuni oleh 95% etnis Armenia dan sebagian etnis Azerbaijan (Febriani, 2018:56). Adanya perbedaan komposisi etnis yang ada di wilayah Nagorno-Karabakh menjadi sangat riskan ketika wilayah ini mulai diatur status kedaulatannya. Dengan demikian, pengaturan status kedaulatan wilayah Nagorno-Karabakh rencananya akan dimasukkan ke dalam Armenia atau Azerbaijan.

Pengaturan status wilayah Nagorno-Karabakh menjadi akar permasalahan konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Pada 2 Desember 1920, Joseph Stalin selaku Komisaris Kebangsaan Uni Soviet menetapkan status wilayah Nagorno-Karabakh di bawah kedaulatan Armenia (O'Ballance, 1997:34). Namun, pemimpin Azerbaijan, yaitu Nariman Narimanov menolak penetapan tersebut karena adanya reaksi dan tekanan dari masyarakat Azerbaijan (Sienrukos, 2007:17). Lebih dari itu, adanya perjanjian antara Uni Soviet dan Turki mengakibatkan penetapan status wilayah Nagorno-Karabakh di bawah kedaulatan Armenia menjadi gagal. Secara spesifik, pemimpin Uni Soviet (Vladimir Lenin) dan pemimpin Turki (Mustafa Kemal Atatürk) menandatangani sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Persaudaraan (*Treaty of Brotherhood*) pada 16 Maret 1921 (Smele, 2015:766). Perjanjian ini mengafirmasi bahwa Uni Soviet dan Turki memiliki solidaritas dalam melawan imperialisme (Isachenko, 2021:9). Lebih lanjut, di dalam perjanjian ini terdapat pasal bahwa status wilayah Karabakh (Nagorno-Karabakh) dan Nakhchivan diserahkan ke dalam kedaulatan Azerbaijan (Cornell, 1999:9). Penetapan status kedua wilayah ini membawa keuntungan bagi Azerbaijan karena wilayah kedaulatannya menjadi luas. Oleh karena itu, status wilayah Nagorno-Karabakh yang awalnya diberikan kepada Armenia justru beralih ke Azerbaijan.

Status wilayah Nagorno-Karabakh di bawah kendali Azerbaijan didukung oleh Joseph Stalin. Stalin menerapkan Kebijakan Kebangsaan terhadap wilayah Nagorno-Karabakh guna memasukan wilayah ini ke dalam

kedaulatan Azerbaijan (Raptis, 1998:5). Kebijakan ini memiliki tujuan agar etnis Armenia yang ada di pegunungan wilayah Nagorno-Karabakh dapat membangun dan memiliki hubungan yang harmonis dengan etnis Azerbaijan yang ada di dataran wilayah tersebut (O'Ballance, 1997:34). Lebih lanjut, penetapan wilayah Nagorno-Karabakh di bawah kedaulatan Azerbaijan ditindaklanjuti oleh Biro Kaukasia. Biro Kaukasia merupakan lembaga yang menetapkan batas wilayah yang baru dianeksasi ke dalam Uni Soviet (Lorusso, 2016:3). Pada 5 Juli 1921, Biro Kaukasia dan Stalin menetapkan bahwa status wilayah Nagorno-Karabakh berada di bawah kedaulatan Azerbaijan (Evers, 2003:30). Penetapan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO) pada 7 Juli 1923 (Gonca, 2016:1). Adanya pembentukan ini membuat NKAO menyandang status daerah otonom di bawah kedaulatan Azerbaijan. Dengan begitu, NKAO dapat mengatur daerah dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Singkat kata, wilayah Nagorno-Karabakh secara sah berubah menjadi *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO) yang masuk ke dalam teritorial Azerbaijan.

Legitimasi wilayah *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO) yang berada di bawah kedaulatan Azerbaijan menimbulkan kekecewaan bagi warga etnis Armenia. Legitimasi NKAO didasari oleh kerangka konstitusi hukum Uni Soviet 1935 dan 1977. Melalui konstitusi Uni Soviet 1935, NKAO dimasukkan ke dalam integritas Azerbaijan, sebaliknya untuk konstitusi Uni Soviet 1977 menyatakan bahwa status NKAO tidak dapat diubah tanpa

persetujuan dari Uni Soviet dan Azerbaijan (Mahmudlu & Ahmadov, 2014:118). Adanya legitimasi kerangka konstitusi hukum ini mengakibatkan seluruh warga etnis Armenia kecewa. Hal ini dikarenakan Vladimir Lenin dan Joseph Stalin membatalkan penyerahan wilayah Nagorno-Karabakh ke dalam kedaulatan Armenia demi Perjanjian Persaudaraan dengan Turki dan atas dasar Kebijakan Kebangsaan. Selain itu, kekecewaan warga Armenia juga datang dari aspek historis. Dahulunya, wilayah Nagorno-Karabakh adalah wilayah Artsakh (NGO, 2013:2). Wilayah Artsakh merupakan bagian dari kedaulatan Armenia yang banyak berdiri kerajaan Armenia di wilayah tersebut (NGO, 2013:2). Adanya aspek historis ini warga Armenia sangat menginginkan penyerahan wilayah Nagorno-Karabakh ke dalam kedaulatan Armenia. Penting untuk digarisbawahi bahwa kekecewaan seluruh warga etnis Armenia semakin diperparah oleh perilaku pemerintah Azerbaijan.

Penduduk etnis Armenia yang tinggal di wilayah *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO) kecewa terhadap perilaku pemerintah Azerbaijan. Dalam hal ini, penduduk etnis Armenia yang tinggal di wilayah NKAO mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah Azerbaijan. Bentuk perlakuan yang tidak adil tersebut, yaitu membatasi otonomi wilayah NKAO, mengabaikan aspek ekonomi dan sosial di wilayah NKAO, dan mendiskriminasi penduduk etnis Armenia yang tinggal di wilayah NKAO (Fraser et al., 1990:656-657). Tujuan pemerintah Azerbaijan melakukan tindakan yang tidak adil tersebut adalah keinginan untuk mengubah komposisi etnis yang ada di wilayah NKAO. Dengan kata lain, pemerintah Azerbaijan

menginginkan wilayah NKAO dihuni oleh mayoritas penduduk etnis Azerbaijan bukan etnis Armenia. Keinginan pemerintah Azerbaijan ini terealisasi dengan menurunnya populasi etnis Armenia di NKAO, yaitu dari 91,2% pada tahun 1939 menjadi 80,5% pada tahun 1970 (Fraser et al., 1990:657). Dengan demikian, ketidakadilan dari perilaku pemerintah Azerbaijan dan adanya penurunan populasi etnis Armenia di wilayah NKAO mengakibatkan seluruh warga etnis Armenia melakukan tuntutan.

Tuntutan yang disampaikan oleh seluruh warga etnis Armenia ditujukan kepada pemerintah Azerbaijan dan Uni Soviet. Seluruh warga etnis Armenia, baik warga yang tinggal di Armenia dan di *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO) menuntut agar wilayah NKAO diberikan kembali ke dalam kedaulatan Armenia. Tuntutan ini telah disampaikan oleh seluruh warga Armenia pada tahun 1930-an, 1940-an, dan 1960-an, tetapi tuntutan ini selalu gagal (Askerov, 2020:57). Pada Januari 1988, 80.000 warga Armenia dan penduduk etnis Armenia yang tinggal di NKAO membuat sebuah petisi agar wilayah NKAO diberikan kepada Armenia (Europe Report, 2005:46). Petisi ini dibuat sebagai bentuk dalam menyikapi tuntutan yang selalu gagal di tahun-tahun sebelumnya. Adanya petisi tersebut mendorong pemerintah NKAO mengeluarkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa wilayah NKAO akan berada di bawah kedaulatan Armenia pada 20 Februari 1988 (Europe Report, 2005:3). Namun, resolusi tentang perubahan kedaulatan tersebut ditolak oleh pemerintah Uni Soviet dan Azerbaijan. Oleh karena itu, segala kekecewaan dan tuntutan yang tidak dihiriaukan oleh pemerintah Uni

Soviet dan Azerbaijan mengakibatkan benih-benih konflik di *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO) muncul.

Benih-benih konflik yang muncul di wilayah *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO) semakin diperkeruh oleh situasi Uni Soviet yang lebih terbuka. Uni Soviet menjadi lebih terbuka ketika Mikhail Gorbachev menjabat sebagai presiden pada tahun 1985. Keterbukaan ini terjadi karena Gorbachev menerapkan kebijakan *glasnost* dan *perestroika* selama pemerintahannya. Secara spesifik, kebijakan *glasnost* (keterbukaan) dapat diartikan sebagai kebebasan semua orang untuk menyatakan pendapatnya atau kebebasan informasi, sedangkan kebijakan *perestroika* (restrukturisasi) dapat dipahami sebagai kebijakan untuk merestrukturisasi sistem ekonomi dan politik Uni Soviet (Goswami, 2020:2-3). Adanya penerapan kebijakan ini mengakibatkan penduduk etnis Armenia yang tinggal di wilayah NKAO melakukan demonstrasi besar-besaran, yaitu menuntut agar wilayah Nagorno-Karabakh dimasukkan ke dalam teritorial Armenia (Fatoni, 2019:448). Imbas dari demonstrasi ini konflik antara Armenia dan Azerbaijan mulai terjadi. Hal ini ditandai dengan pemerintah Armenia melakukan deportasi terhadap penduduk etnis Azerbaijan yang tinggal di Armenia (Raptis, 1998:5). Sebaliknya, pemerintah Azerbaijan juga melakukan pembantaian dan deportasi terhadap penduduk etnis Armenia yang tinggal di Azerbaijan (Raptis, 1998:5). Singkat kata, Uni Soviet berusaha memulihkan hubungan antara Armenia dan Azerbaijan.

Usaha yang dilakukan oleh Uni Soviet untuk memulihkan hubungan antara Armenia dan Azerbaijan tampaknya gagal. Kegagalan ini terjadi karena Armenia dan Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya di penghujung runtuhnya Uni Soviet. Secara spesifik, Armenia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada 23 September 1991 dan Azerbaijan pada 30 Agustus 1991 (CVCE, 2016:2). Sementara itu, Uni Soviet bubar disebabkan oleh penerapan kebijakan *glasnost* dan *perestroika* yang tidak efektif, sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan sosial di Uni Soviet, serta di negara-negara satelitnya (Regina, 2018:78). Bubarnya Uni Soviet ditandai dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai presiden Uni Soviet pada 25 Desember 1991 (Regina, 2018:79-80). Dengan runtuhnya pemerintahan Uni Soviet mendorong pemerintahan *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO) mendeklarasikan kemerdekaannya dari Azerbaijan pada 6 Januari 1992 (Europe Report, 2005:4). Deklarasi kemerdekaan yang dinyatakan oleh Armenia, Azerbaijan, dan wilayah NKAO, serta runtuhnya Uni Soviet mendorong masing-masing wilayah ini mulai menentukan nasib dan kepentingannya sendiri. Penting untuk digarisbawahi bahwa Armenia dan Azerbaijan menggunakan seluruh kekuataannya untuk mendapatkan wilayah Nagorno-Karabakh pasca runtuhnya Uni Soviet.

Pasca runtuhnya Uni Soviet, Armenia dan Azerbaijan berada dalam keadaan *maximalist position* atas wilayah Nagorno-Karabakh. *Maximalist position* adalah Armenia dan Azerbaijan memiliki status *status quo* atas wilayah Nagorno-Karabakh, yaitu Armenia menolak reintegrasi wilayah

Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan, sebaliknya Azerbaijan menolak kemerdekaan wilayah tersebut (Ismailzade, 2011:5). Hal ini mendorong Armenia dan Azerbaijan melakukan perang berskala penuh atas wilayah Nagorno-Karabakh pada tahun 1992-1994. Di dalam perang ini tampaknya Armenia unggul karena pasukan militer Armenia berhasil menduduki tujuh distrik Azerbaijan dan wilayah Nagorno-Karabakh menjelang akhir tahun 1993 (Askerov, 2020:55). Tujuh distrik wilayah Azerbaijan yang dimaksud ialah Ağdam, Fuzuli, Gubadli, Jabrail, Kalbajar, Lachin, dan Zangilan (Askerov, 2020:56). Seiring berjalannya waktu, Menteri Pertahanan Rusia Pavel Grachev mengadakan perjanjian gencatan senjata yang disepakati oleh Armenia dan Azerbaijan pada 16 Mei 1994 (Fatoni, 2019:448). Namun, perjanjian tersebut diingkari oleh Armenia dan Azerbaijan. Hingga pada akhirnya, wilayah Nagorno-Karabakh adalah wilayah administratif independen yang diakui Armenia secara de jure dan Azerbaijan secara de facto (Hartati, 2020:202). Alhasil, penyelesaian konflik antara Armenia dan Azerbaijan terhadap wilayah Nagorno-Karabakh sulit dicapai.

2.2 Keterlibatan Turki dan Rusia dalam Konflik Nagorno-Karabakh

2.2.1 Keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh

Turki mulai menaruh perhatian kepada negara-negara yang ada di wilayah Kaukasus Selatan pasca Uni Soviet bubar. Dalam hal ini, Armenia dan Azerbaijan yang berada di wilayah Kaukasus Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya menjelang Uni Soviet bubar. Adanya kemerdekaan ini mendorong Turki untuk membangun hubungan dengan

negara-negara yang baru merdeka tersebut (Koolae, 2016:60). Dorongan ini disebabkan oleh alasan keuntungan ekonomi dan bisnis di wilayah Kaukasus Selatan yang sangat menjanjikan bagi Turki (Sagbansua & Can, 2011:82). Ditambah lagi, Turki juga memiliki keinginan untuk menjadi aktor yang paling berpengaruh bagi negara-negara yang ada di Kaukasus Selatan (Heshmatollah et al., 2015:37). Dorongan dan keinginan ini dipertegas oleh pidato Presiden Turki Turgut Ozal yang menyatakan bahwa Turki akan mengambil kesempatan besar untuk menjadi pemimpin kawasan bagi negara-negara yang ada di wilayah Kaukasus Selatan pasca Uni Soviet bubar (Sagbansua & Can, 2011:82). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Turki akan memfokuskan Armenia atau Azerbaijan sebagai negara yang akan dipengaruhi. Dengan demikian, Turki berusaha memberikan pengaruh kepada Armenia atau Azerbaijan guna menjadi pemimpin kawasan di wilayah Kaukasus Selatan.

Upaya yang dilakukan oleh Turki untuk memberikan pengaruh kepada Armenia dan Azerbaijan ialah dengan cara terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh. Konflik Nagorno-Karabakh yang pecah pasca Uni Soviet bubar mendorong Turki untuk terlibat dalam konflik tersebut. Awalnya, Turki terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh sebagai pihak mediator yang memberikan resolusi damai kepada Armenia dan Azerbaijan. Akan tetapi, resolusi damai yang diberikan oleh Turki selalu gagal. Seiring berjalannya waktu, Turki yang awalnya berperan sebagai

pihak mediator beralih sebagai pihak yang pro terhadap Azerbaijan. Momentum peralihan ini terjadi ketika pasukan militer Armenia melakukan pembantaian kepada penduduk etnis Azerbaijan di Kota Khojaly pada 26 Februari 1992 (Abilov, 2015:31). Hal ini kemudian mendorong Turki untuk mengangkat peristiwa pembantaian tersebut ke dalam ranah regional pada Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa pada 28 Februari 1992 (Bolukbasi, 1997:84). Ditambah lagi, di tingkat internasional Turki juga mengangkat peristiwa pembantaian ini ke Dewan Keamanan PBB (Hasanov, 2014:35). Oleh karena itu, usaha Turki dalam mengangkat kasus pembantaian Khojaly 1992 bertransformasi menjadi strategi dasar Turki untuk mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Strategi dasar Turki dalam mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh tertuang dalam kebijakan luar negeri Turki. Di dalam kebijakan luar negeri Turki menyatakan bahwa (Bolukbasi, 1997:81):

1. Turki mendukung kemerdekaan Azerbaijan.
2. Turki mendukung kedaulatan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh.
3. Turki berpartisipasi dalam produksi dan ekspor minyak Azerbaijan.
4. Turki berupaya menjaga hubungan dengan pemerintah Azerbaijan.

Adanya strategi ini mendorong Turki untuk membantu Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Turki secara konsisten memberikan bantuan militer kepada Azerbaijan dan memberikan bantuan kemanusiaan berupa

kamp-kamp bagi warga Azerbaijan yang mengungsi selama konflik Nagorno-Karabakh terjadi (Ismailzade, 2006:5). Selain itu, Turki juga sempat mengusulkan pembicaraan damai antara Armenia dan Azerbaijan guna mengakhiri konflik Nagorno-Karabakh. Menteri Luar Negeri Turki Ismail Cem menginisiasi pertemuan dengan Armenia dan Azerbaijan untuk mendiskusikan solusi konflik Nagorno-Karabakh pada 17 Februari 2001 (RFE/RL, 2001b). Namun, pihak Armenia menolak pertemuan tersebut pada 19 Februari 2001 karena Turki memiliki posisi yang sepihak dengan Azerbaijan (RFE/RL, 2001a). Singkat kata, pertemuan ini gagal dilaksanakan dan hubungan antara Turki dan Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh semakin erat.

Keakraban hubungan antara Turki dan Azerbaijan diuji saat konflik Nagorno-Karabakh kembali pecah. Pada 27 September 2020, konflik Nagorno-Karabakh kembali pecah yang mendorong Turki harus memposisikan dirinya terhadap konflik tersebut. Posisi Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh ialah sebagai pihak yang mendukung Azerbaijan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan secara terbuka mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh pada 27 September 2020 (Independent, 2020). Dukungan yang diberikan Presiden Erdoğan kepada Azerbaijan terlihat hanya secara politik, tetapi kenyataannya ada tuduhan bahwa alutsista militer Turki dikerahkan guna menghancurkan pihak lawan, yaitu Armenia. Kementerian Pertahanan Armenia mengklaim bahwa pesawat tempurnya, yaitu Su-25

ditembak jatuh oleh pesawat F-16 milik Turki di wilayah udara Armenia pada 29 September 2020 (TASS, 2020b). Namun, Juru Bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin dan Menteri Pertahanan Azerbaijan Kolonel Jenderal Zakir Hasanov membantah hal tersebut karena pihak Armenia tidak memberikan bukti yang konkret atas kejadian tersebut (TASS, 2020b). Adanya dukungan Turki kepada Azerbaijan dan tuduhan Armenia yang tidak terverifikasi semakin memperkeruh situasi konflik Nagorno-Karabakh. Penting untuk digarisbawahi bahwa Turki terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh (2020) hanya memberikan dukungan secara politik kepada Azerbaijan.



Gambar 2.1 Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait Pembangunan Pusat Gabungan Turki-Rusia (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2020a)

Merujuk pada gambar 2.1, keterlibatan Turki tidak hanya sebatas memberikan dukungan kepada Azerbaijan melainkan juga terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh. Dalam hal ini, Turki terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh bersama Rusia. Pada 10 November 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kesepakatan untuk

membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia di Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh (Presidency of The Republic of Turkiye, 2020b). Lebih lanjut, kesepakatan terkait Pusat Gabungan Turki-Rusia yang telah dibicarakan oleh Presiden Erdoğan dan Presiden Putin ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertahanan Turki dan Rusia. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melalui konferensi video menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait pembentukan Pusat Gabungan Turki-Rusia pada 11 November 2020 (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2020a). Melalui Pusat Gabungan Turki-Rusia ini Turki mencapai kerja sama yang strategis bersama Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh. Dengan demikian, lokasi dari Pusat Gabungan Turki-Rusia akan dibahas oleh *stakeholder* yang bersangkutan.

Penentuan lokasi Pusat Gabungan Turki-Rusia sempat mengalami kendala. Awalnya, Rusia ingin mendirikan bangunan Pusat Gabungan Turki-Rusia di wilayah Azerbaijan tepatnya di Kota Ganja atau Kota Barda (Goble, 2021). Akan tetapi, pihak Azerbaijan dan Turki menolak hal tersebut karena Kota Ganja dan Kota Barda jauh dari wilayah Nagorno-Karabakh (Goble, 2021). Adanya penolakan ini mendorong Azerbaijan, Turki, dan Rusia melakukan perundingan kembali. Perundingan terkait lokasi ini ditujukan agar Pusat Gabungan Turki-Rusia bisa secara efektif menjalankan tugasnya. Hingga pada akhirnya, lokasi bangunan Pusat Gabungan Turki-Rusia ditetapkan di

wilayah Ağdam, Azerbaijan (International Crisis Group, 2020:5). Penetapan wilayah Ağdam sebagai lokasi bangunan Pusat Gabungan Turki-Rusia dikarenakan wilayah tersebut dekat dengan wilayah Nagorno-Karabakh. Jarak bangunan Pusat Gabungan Turki-Rusia yang dekat dengan wilayah Nagorno-Karabakh dapat mempermudah Turki dan Rusia dalam mengawasi perjanjian gencatan 9 November 2020. Selain itu, Rusia bisa mengerahkan pasukan ke wilayah Nagorno-Karabakh secara cepat apabila perjanjian gencatan senjata dilanggar oleh Armenia dan Azerbaijan. Oleh karena itu, Pusat Gabungan Turki-Rusia Turki-Rusia didirikan.



Gambar 2.2 Pusat Gabungan Turki-Rusia milik Turki dan Rusia di Kota Ağdam, Azerbaijan (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2021a)

Merujuk pada gambar 2.2, Pusat Gabungan Turki-Rusia diresmikan. Pada 30 Januari 2021, bangunan Pusat Gabungan Turki-

Rusia diresmikan oleh Menteri Pertahanan Azerbaijan Zakir Hasanov, Wakil Menteri Pertahanan Turki Yunus Emre Karaosmanoğlu, dan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin, serta dihadiri oleh 60 tentara Turki dan 60 tentara Rusia (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2021a). Bangunan ini digunakan untuk mengawasi perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November 2020. Manajemen dari pengawasan dari Pusat Gabungan Turki-Rusia akan dipimpin oleh Mayor Jenderal Abdullah Katirci dari pihak Turki dan dari pihak Rusia dipimpin oleh Mayor Jenderal Viktor Fedorenko (Rácz, 2021). Masing-masing militer Turki dan Rusia yang bekerja di Pusat Gabungan Turki-Rusia akan menggunakan pesawat tanpa awak (*drone*) untuk mengawasi perjanjian gencatan 9 November 2020 (Goble, 2021). Informasi yang didapatkan oleh *drone* ini akan dikaji oleh pihak Turki dan Rusia di pusat tersebut. Apabila ada kontak senjata atau konflik di lapangan khususnya wilayah Nagorno-Karabakh, maka pasukan perdamaian Rusia akan terjun ke lokasi yang menjadi titik konflik tersebut. Disisi lain, bangunan Pusat Gabungan Turki-Rusia memiliki luas 4 hektar yang mencakup 65 bangunan prefabrikasi dengan fasilitas yang mendukung dan bangunan ini juga sudah dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2021b). Alhasil, Turki berkolaborasi dengan Rusia dalam Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020.

2.2.2 Keterlibatan Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh

Rusia sebagai penerus Uni Soviet memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh. Dalam hal ini, Rusia berusaha untuk membangun hubungannya kembali dengan Armenia dan Azerbaijan guna menyelesaikan konflik tersebut. Secara spesifik, hubungan diplomatik antara Rusia dan Armenia dibangun pada 3 April 1992 (Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Armenia, 2019). Sementara itu, hubungan diplomatik antara Rusia dan Azerbaijan dijalin pada 4 April 1992 (Republic of Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs., 2020). Adanya hubungan diplomatik ini memungkinkan Rusia membantu Armenia dan Azerbaijan dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh. Kemungkinan ini ada karena Rusia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Armenia dan Azerbaijan (Sargsyan, 2003). Rusia berperan sebagai pihak mediator guna mempengaruhi Armenia dan Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Rusia memainkan perannya ini ketika Menteri Pertahanan Rusia Pavel Grachev mengadakan perjanjian gencatan senjata yang disepakati oleh Armenia dan Azerbaijan pada 16 Mei 1994 (Fatoni, 2019:448). Hingga saat ini Rusia selalu berperan sebagai pihak mediator dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Dengan demikian, Rusia selalu berusaha dekat dengan Armenia dan Azerbaijan agar konflik Nagorno-Karabakh dapat diselesaikan.

Pertama, Rusia mendekatkan diri dengan Armenia melalui hubungan ekonomi, politik, dan militer. Dalam aspek ekonomi, Rusia merupakan mitra dagang luar negeri dan investor asing utama bagi perekonomian Armenia (Republic of Azerbaijan Ministry of Foreign Affairs., 2020). Berikutnya, dalam aspek politik, Armenia memiliki visi yang menyatakan bahwa Rusia adalah negara pengganti Barat dalam perspektif geopolitik (Shirinyan, 2019:6). Adanya visi ini membuat Rusia dengan mudah mempengaruhi Armenia dari segi politik. Kemudian, dalam aspek militer, Armenia dan Rusia adalah anggota dari Collective Security Treaty Organization (CSTO) (Dragneva & Wolczuk, 2013:223). Armenia masuk dalam keanggotaan CSTO bertujuan agar keamanan kedaulatannya terjamin. Selain itu, keanggotaan ini membuat Rusia bisa menempatkan pangkalan militernya di Armenia, yaitu Pangkalan Militer 102 di Gyumri dan Pangkalan Angkatan Erebuni di Yerevan (Kogan, 2016). Dalam berbagai aspek hubungan yang telah dijalin bahwa Armenia sangat bergantung dengan Rusia, baik dari aspek ekonomi dan militer. Adanya ketergantungan ini membuat Armenia menganggap Rusia sebagai sekutu. Oleh karena itu, Rusia dapat lebih mudah menggiring Armenia dalam segala hal dengan tumpuan ekonomi dan keamanan yang terjamin.

Kedua, Rusia juga mendekatkan diri dengan Azerbaijan dalam aspek ekonomi, politik, dan militer. Dalam aspek politik, Rusia memilih pendekatan yang lebih lunak dan pragmatis terhadap Azerbaijan

(Valiyev, 2011:134). Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Rusia adalah berperan sebagai pihak mediator dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Hal ini dilakukan oleh Rusia untuk membatasi pengaruh Barat terhadap Azerbaijan (Aslanlı, 2010:138). Berikutnya, dalam aspek ekonomi, Azerbaijan tidak terlalu bergantung kepada Rusia. Hal ini dikarenakan Azerbaijan merupakan penghasil minyak dan gas dunia (Yadav, 2019:571). Kemudian, dalam aspek militer, Rusia dan Azerbaijan terlibat dalam kerja sama pendidikan dan pelatihan militer, serta perdagangan senjata (Makili-Aliyev, 2013:5). Dalam aspek ini Azerbaijan juga tidak terlalu bergantung kepada Rusia. Hal ini dikarenakan Azerbaijan dan Turki juga melakukan kerja sama terkait pendidikan dan pelatihan militer, serta perdagangan senjata. Apabila dilihat dari berbagai aspek hubungan yang telah dijalin bahwa Azerbaijan tidak terlalu memiliki ketergantungan kepada Rusia. Singkat kata, Rusia selalu berhati-hati menjaga hubungannya dengan Azerbaijan walaupun ada keuntungan yang diambil dalam hubungan ini.

Hubungan Rusia dengan Armenia dan Azerbaijan menjadi sangat krusial dalam konflik Nagorno-Karabakh. Konflik Nagorno-Karabakh menjadi momentum bagi Rusia untuk memainkan perannya sebagai pihak mediator. Presiden Rusia Vladimir Putin berupaya melakukan mediasi dalam konflik Nagorno-Karabakh yang pecah pada 27 September 2020. Pada 8 Oktober 2020, Presiden Putin mengundang Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia untuk ke Moskow pada 9

Oktober 2020 (France 24, 2020). Para menteri ini hadir dan perundingan terjadi antara Menteri Luar Negeri Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9-10 Oktober 2020. Perundingan ini berakhir dengan persetujuan gencatan senjata yang diakui oleh Armenia dan Azerbaijan (DW, 2020). Namun, perjanjian gencatan senjata ini gagal karena Azerbaijan menghantam kembali kota Stepanakert di wilayah Nagorno-Karabakh (DW, 2020). Perjanjian gencatan senjata yang sulit dicapai oleh Armenia dan Azerbaijan ini tidak lain karena mekanisme yang sukar diterima oleh kedua negara tersebut. Dengan kata lain, klaim atas wilayah Nagorno-Karabakh yang saling tumpah tindih mendorong Armenia dan Azerbaijan tidak ingin wilayah tersebut jatuh ke salah satu pihak. Penting untuk digarisbawahi bahwa Rusia terus berupaya agar perjanjian gencatan yang telah dibuat dapat dipatuhi kembali oleh Armenia dan Azerbaijan.



Gambar 2.3 Peta Perjanjian Gencatan Senjata (BBC, 2020a)

Merujuk pada gambar 2.3, penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh kali ini ditengahi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam hal ini, penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh dilakukan melalui konferensi video pada 9 November 2020. Pada 9 November 2020, Perdana Menteri Pashinyan dan Presiden Aliyev yang ditengahi Presiden Putin menandatangani perjanjian tentang gencatan senjata dan penghentian permusuhan di zona konflik Nagorno-Karabakh (President of Russia, 2020b). Perjanjian yang ditandatangani oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia tertulis sebagai berikut (President of Russia, 2020a):

1. Armenia dan Azerbaijan melakukan gencatan senjata dan penghentian semua permusuhan di daerah konflik Nagorno-Karabakh yang mulai dilakukan pukul 12:00 (tengah malam) waktu Moskow pada 10 November 2020.
2. Armenia mengembalikan Distrik Ağdam kepada Republik Azerbaijan pada 20 November 2020.
3. Armenia mengembalikan Distrik Kalbajar ke Republik Azerbaijan pada 15 November 2020 dan Distrik Lachin pada 1 Desember 2020. Secara spesifik, koridor Lachin (lebar 5 km) yang menghubungkan Nagorno-Karabakh dan Armenia akan tetap berada di bawah kendali pasukan perdamaian Rusia.
4. Pasukan perdamaian Rusia, yaitu 1.960 tentara bersenjata apa, 90 kendaraan lapis baja, dan 380 kendaraan bermotor, serta unit

peralatan khusus akan dikerahkan si sepanjang garis kontak Nagorno-Karabakh dan koridor Lachin.

5. Pasukan perdamaian Rusia akan dikerahkan bersamaan dengan penarikan pasukan Armenia. Pasukan perdamaian Rusia akan dikerahkan selama lima tahun, dengan perpanjangan otomatis lima tahun berikutnya apabila tidak ada pihak yang menyatakan niatnya untuk menghentikan penerapan ketentuan ini sebelum enam bulan periode masa berakhir dari ketentuan ini.
6. Untuk pemantauan yang lebih efisien atas kesepakatan para pihak terhadap perjanjian, pusat perdamaian harus didirikan untuk mengawasi gencatan senjata.
7. Para pengungsi dan pengungsi internal harus kembali ke wilayah Nagorno-Karabakh dan sekitarnya di bawah pengawasan United Nations Nations High Commissioner for Refugeess (UNHCR).
8. Armenia dan Azerbaijan menukar tawanan perang, sandera, dan orang-orang yang ditahan lainnya, serta para korban.
9. Semua koneksi ekonomi dan transportasi di wilayah tersebut harus dibuka blokirnya. Armenia harus menjamin keamanan jaringan transportasi antara wilayah barat Azerbaijan dan Nakhichevan. Kontrol atas jaringan transportasi ini akan diawasi oleh Dinas Keamanan Rusia.

Perjanjian gencatan senjata yang disepakati oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia tampaknya berat sebelah. Beberapa ketentuan

dalam perjanjian ini memberikan keuntungan bagi Azerbaijan. Hal ini dikarenakan di dalam ketentuan perjanjian gencatan senjata tercantum bahwa wilayah Ağdam, Kalbajar, dan Lachin diberikan kepada Azerbaijan. Ditambah lagi, Azerbaijan juga berhasil merebut kembali wilayah Fuzuli, Gubadli, Jabrail, dan Zangilan dalam konflik Nagorno-Karabakh yang pecah pada 27 September 2020. Wilayah Ağdam, Fuzuli, Gubadli, Jabrail, Kalbajar, Lachin, dan Zangilan merupakan bagian dari Azerbaijan yang dikuasai oleh etnis separatis Armenia sejak 1993 (Askerov, 2020:55). Dengan begitu, konflik Nagorno-Karabakh (2020) memberi kekalahan bagi Armenia dan kemenangan bagi Azerbaijan. Hal ini dikarenakan Azerbaijan berhasil merebut kembali wilayahnya yang dikuasai oleh etnis separatis Armenia. Namun, Perdana Menteri Nikol Pashinyan merasa tidak kalah dalam konflik Nagorno-Karabakh (2020) karena perjanjian gencatan senjata ini telah memiliki analisis yang mendalam dan diskusi dari para ahli terbaik di lapangan (BBC, 2020a). Alhasil, konflik Nagorno-Karabakh dapat berakhir dengan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia.

2.3 Hubungan antara Turki dengan Armenia dan Azerbaijan

2.3.1 Hubungan antara Turki dan Armenia

Hubungan antara Turki dan Armenia secara legal tidak pernah terjalin hingga saat ini. Dalam hal ini, Turki hanya mengakui kemerdekaan Armenia sebagai negara berdaulat pada 16 Desember 1991 (Ayunts & Kose, 2019:15). Akan tetapi, Turki dan Armenia secara

bilateral tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal ini dikarenakan Turki memiliki masalah dengan Armenia berupa isu genosida. Secara spesifik, Turki pada zaman Kekaisaran Otoman pernah melakukan tindakan genosida terhadap penduduk etnis Armenia pada tahun 1915 (Goksel, 2010:194). Tindakan ini membuat bangsa Armenia kecewa kepada Turki. Kekecewaan ini menyebabkan Armenia meletakkan isu genosida Armenia di dalam kebijakan luar negerinya. Tujuan Armenia mendudukan isu genosida Armenia di dalam kebijakan luar negerinya ialah agar isu ini mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan Turki., serta untuk menuntut Turki membayar kompensasi atas tindakan genosida tersebut. Namun, langkah Armenia ini sia-sia karena Pemerintah Turki hingga saat ini secara tegas tidak mengakui tindakan genosida Armenia (Nichol, 2012:13). Dengan demikian, isu genosida Armenia telah menjadi batu sandungan bagi Turki dan Armenia dalam membangun hubungan diplomatik.

Masalah lain yang membuat ketiadaan hubungan diplomatik antara Turki dan Armenia adalah masalah perbatasan. Masalah perbatasan ini berkaitan dengan konflik Nagorno-Karabakh. Konflik Nagorno-Karabakh mendorong Turki untuk terlibat dalam konflik tersebut. Keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh terjadi ketika negara ini mendukung Azerbaijan pasca peristiwa pembantaian di Kota Khojaly pada 26 Februari 1992. Pasca peristiwa ini pasukan militer Armenia berhasil melakukan invasi di provinsi Kalbajar, Azerbaijan

pada tahun 1993 (Balci, 2014:48). Imbas dari invasi ini memicu penduduk etnis Azerbaijan yang tinggal di provinsi tersebut mengungsi secara besar-besaran (Punsmaann, 2013:4). Adanya peristiwa pembantaian dan invasi mendorong Turki untuk menutup perbatasannya dengan Armenia. Turki secara resmi menutup perbatasannya dengan Armenia pada 3 April 1993 dan melakukan embargo ekonomi kepada Armenia pada tahun yang sama (Freire & Simão, 2007:8). Penutupan perbatasan dan embargo ekonomi yang dilakukan oleh Turki terhadap Armenia membuat hubungan kedua negara menjadi rumit. Rumitnya hubungan antara Turki dan Armenia membuat kedua negara tidak berkembang dalam hubungan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara Turki dan Armenia stagnan.

Isu genosida Armenia dan masalah perbatasan yang menjadi kendala bagi hubungan Turki dan Armenia justru menarik perhatian aktor non-pemerintah. Aktor non-pemerintah yang dimaksud ialah Turkish Armenian Reconciliation Commission (TARC). TARC dibentuk pada 9 Juli 2001 (Gorgulu, 2008:24). Pembentukan TARC ini mendapatkan persetujuan dari pemerintah Turki dan Armenia, serta didukung oleh Amerika Serikat. Ide dari pembentukan TARC ini berasal dari David Phillips, seorang diplomat Amerika Serikat (Mandaci, 2014:247). Phillips melihat bahwa hubungan Turki dan Armenia bisa diperbaiki oleh pengaruh masyarakat sipil kedua negara. Lebih lanjut, TARC diduduki oleh enam anggota dari Turki (Gündüz Aktan, Üstün

Ergüder, Sadi Ergüvenç, Özdem Sanberk, İlter Türkmen, dan Vamık Volkan) dan empat anggota dari Armenia (Alexander Arzumian, David Hovhanissian, Van Z. Krikorian, dan Andranik Migran) (Gorgulu, 2008:24). Adanya TARC ini bisa dilihat sebagai bentuk dari pendekatan *bottom-up*. Artinya, apabila masyarakat Turki dan Armenia memiliki hubungan yang baik, maka akan mempengaruhi kebijakan pemerintah Turki dan Armenia dalam membuka hubungan diplomatik. Singkat kata, TARC menjadi wadah bagi masyarakat sipil Turki dan Armenia dalam memperbaiki hubungan kedua negara tersebut.

Turkish Armenian Reconciliation Commission (TARC) memiliki tugas yang krusial. TARC memiliki tugas untuk menormalisasikan hubungan Turki dan Armenia (Gorgulu, 2008:25). Tujuan dari normalisasi ini adalah agar Turki dan Armenia dapat membuka perbatasannya demi kepentingan hubungan diplomatik. TARC melakukan upaya normalisasi dengan cara menyelidiki permasalahan yang dihadapi oleh Turki dan Armenia, serta merumuskan strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, TARC menghadapi kritikan dari masyarakat Armenia khususnya Federasi Revolusioner Armenia (*Dashnaksutyun*). *Dashnaksutyun* mendesak agar TARC mengikutsertakan isu genosida Armenia dalam upaya normalisasi hubungan Turki dan Armenia. Hal ini mendorong TARC meminta pendapat yang tidak mengikat secara hukum kepada *International Center for Transitional Justice* (ICTJ) atas isu genosida Armenia

(Goshgarian, 2006). Pada 4 Februari 2003, ICTJ menerbitkan laporan bahwa penerapan surut atas isu genosida Armenia tidak berlaku, sehingga Armenia tidak dapat menuntut ganti rugi atau mendapat pengakuan dari Turki (Gorgulu, 2008:25). Hasil dari laporan ini membuat pihak Armenia meninggalkan TARC dan mengakibatkan TARC bubar pada 14 April 2004 (Gorgulu, 2008:26). Penting untuk digarisbawahi bahwa TARC mengakhiri tugasnya sebelum hubungan Turki dan Armenia ternormalisasi.

Kegagalan Turkish Armenian Reconciliation Commission (TARC) direspon oleh pemerintah Turki dan Armenia. Dalam hal ini, upaya normalisasi hubungan antara Turki dan Armenia di tingkat pemerintah dimulai pada tahun 2009. Normalisasi hubungan Turki dan Armenia ditengahi oleh Switzerland dengan hasil output berupa dua protokol, yaitu *Protocol on the Establishment of Diplomatic Relations* dan *Protocol on the Development of Bilateral Relations* (Philips, 2012:1). Kedua protokol ini lebih dikenal dengan Protokol Zurich. Protokol Zurich ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoğlu dan Menteri Luar Negeri Armenia Edvard Nalbandian di Zurich pada 10 Oktober 2009 (Shiriyev & Davies, 2013:199). Protokol yang telah ditandatangani oleh menteri luar negeri Turki dan Armenia ini kemudian dibawa ke parlemen masing-masing negara. Secara spesifik, Turki mengirimkan proposal protokol Zurich ke *Grand National Assembly* dan Armenia mengirimkan proposal protokol tersebut

ke *Constitutional Court* (Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey, 2011). Masing-masing parlemen ini akan meninjau kelayakan dari proposal tersebut. Dengan demikian, proposal protokol ini akan di proses oleh masing-masing parlemen kedua negara tersebut untuk kemudian diratifikasi dan diaplikasikan.

Proposal protokol Zurich mengalami kendala saat diproses di tingkat parlemen Turki dan Armenia. Kendala ini muncul ketika pihak Turki menambahkan sebuah prasyarat dalam proposal tersebut. Prasyarat yang ditambahkan Turki dalam proposal protokol Zurich berkaitan dengan isu konflik Nagorno-Karabakh (Yilmaz & Yorulmaz, 2021:187). Prasyarat ini ditambahkan oleh Turki karena solidaritasnya dengan Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Dengan kata lain, Turki tidak akan meratifikasi proposal protokol Zurich sebelum Armenia berdamai dengan Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Menanggapi hal tersebut, Armenia juga membalas dengan memasukan sebuah prasyarat berupa isu genosida Armenia dalam proposal protokol Zurich (Minasyan, 2010:28). Armenia meminta agar Turki juga mengakui prasyarat ini di dalam proposal tersebut. Artinya, Armenia juga tidak akan meratifikasi proposal tersebut sebelum Turki mengakui tindakan genosida yang terjadi pada zaman Kekaisaran Otoman. Seiring berjalannya waktu, parlemen Turki tidak meratifikasi proposal protokol Zurich dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh Armenia. Disinyalir Turki tidak meratifikasi protokol tersebut karena prasyarat

yang ditambahkan oleh Armenia. Oleh karena itu, proposal protokol Zurich ditangguhkan.

Penangguhan proposal protokol Zurich dilakukan oleh pihak Armenia. Pihak Armenia menangguhkan proposal tersebut pada 22 April 2010 (Elanchenny & Maraşlıyan, 2012:5). Penangguhan ini dilakukan karena Armenia melihat bahwa Turki tidak serius dalam meratifikasi proposal protokol Zurich. Pasca penangguhan ini Armenia mencoba untuk kembali meratifikasi proposal protokol Zurich tanpa prasyarat apapun yang ditambahkan dalam proposal tersebut. Namun, Turki tetap teguh pada pendiriannya bahwa prasyarat yang ditambahkan dalam proposal Protokol Zurich harus dipatuhi oleh Armenia. Perbedaan pandangan antara Turki dan Armenia dalam proses ratifikasi proposal protokol Zurich mengakibatkan proposal ini sulit untuk diratifikasi. Hingga pada akhirnya, proposal protokol Zurich mangkrak di tingkat parlemen Turki dan parlemen Armenia juga membatalkan proposal tersebut. Pihak Armenia secara resmi membatalkan proposal Protokol Zurich pada 1 Maret 2018 (Abrhamyan, 2018:1). Singkat kata, normalisasi hubungan Turki dan Armenia dalam ratifikasi proposal Protokol Zurich di tingkat parlemen gagal karena Turki ingin protokol tersebut ada prasyarat tambahan.

Normalisasi hubungan antara Turki dan Armenia tampaknya sulit dilakukan. Kesulitan ini datang dari adanya konflik Nagorno-Karabakh. Perbedaan kepentingan antara Turki dan Armenia dalam konflik

Nagorno-Karabakh menjadi salah satu penghambat upaya normalisasi hubungan kedua negara tersebut. Secara spesifik, Turki memiliki kepentingan untuk mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Kepentingan ini muncul karena Turki ingin Azerbaijan dapat mempertahankan kedaulatan wilayah Nagorno-Karabakh dari pasukan militer Armenia (Isachenko, 2020:2). Sementara itu, Armenia memiliki kepentingan untuk memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh dari Azerbaijan (NGO, 2013:2). Kepentingan yang berbeda dalam konflik Nagorno-Karabakh menjadi pembatas bagi hubungan Turki dan Armenia. Selain itu, eksekusi dari perbedaan kepentingan ini mengakibatkan Turki dan Armenia tidak memiliki hubungan diplomatik hingga saat ini. Ketiadaan hubungan diplomatik antara Turki dan Armenia mendorong kedua negara ini untuk berusaha mencapai kepentingannya masing-masing dalam konflik Nagorno-Karabakh. Penting untuk digarisbawahi bahwa kaitan antara hubungan Turki dan Armenia dalam konflik Nagorno-Karabakh ialah keduanya memiliki kepentingan dan sikap yang berbeda dalam menanggapi konflik tersebut, sehingga berdampak pada ketiadaan hubungan diplomatik antara Turki dan Armenia.

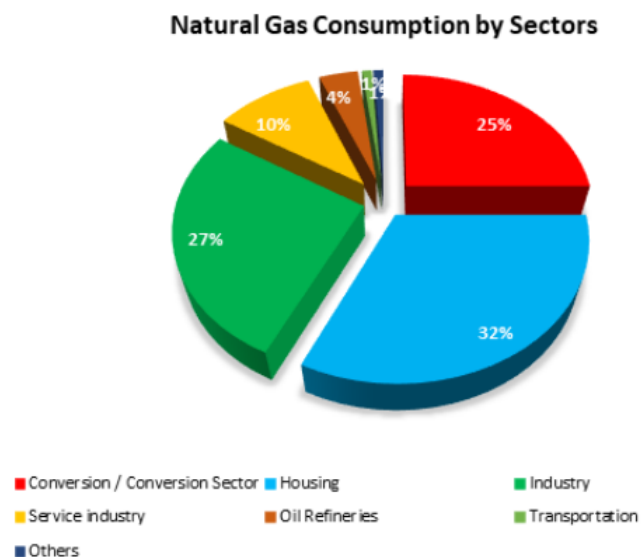
2.3.2 Hubungan antara Turki dan Azerbaijan

Hubungan antara Turki dan Azerbaijan terjalin dengan baik. Dalam hal ini, Turki mengakui kemerdekaan Azerbaijan pada 30 Agustus 1991 (Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey, 2011).

Adanya pengakuan ini mendorong Turki membuka hubungan diplomatik dengan Azerbaijan pada 14 Januari 1992 (Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey, 2011). Lebih dari itu, Turki dan Azerbaijan juga memiliki sebuah prinsip yang bernama prinsip *one nation, two states*. Prinsip ini dikemukakan oleh Presiden Azerbaijan Heydar Aliyev pada tahun 1990 (Isachenko, 2020:2). Arti dari prinsip *one nation, two states* ialah Turki dan Azerbaijan memiliki ikatan agama dan budaya yang sama. Secara agama, mayoritas dari Bangsa Turki dan Azerbaijan menganut agama Islam. Secara spesifik, Turki menganut agama Islam aliran Sunni, sedangkan Azerbaijan menganut agama Islam aliran Syiah (Ismayilov & Graham, 2016:137-138). Perbedaan aliran agama Turki dan Azerbaijan ini tidak berdampak buruk bagi hubungan kedua negara tersebut. Berikutnya, dalam aspek budaya, Turki dan Azerbaijan memiliki kesamaan rumpun etnis, yaitu Bangsa Turk (BBC, 2020b). Dengan demikian, hubungan Turki dan Azerbaijan berkembang dalam aspek ekonomi dan militer.

Dalam aspek ekonomi, Turki mengandalkan Azerbaijan. Turki dan Azerbaijan membuka hubungan ekonomi pada 1 November 1992 (Mikail et al., 2019:517). Hubungan ini kemudian diperkuat dengan Perjanjian tentang Kerjasama dan Perdagangan pada 23 Januari 1993 (Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Republic of Turkey, 2020). Dengan adanya perjanjian ini, maka kegiatan ekonomi antara Turki dan Azerbaijan berlangsung dan berjalan dengan baik. Dalam

kegiatan ekonomi Turki dan Azerbaijan secara periodik aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam kegiatan ekspor, Turki menjual barang-barangnya ke Azerbaijan berupa bahan konstruksi besi/baja, produk pembersih, radio, dan televisi (Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey, 2011). Sebaliknya, terkait impor, Turki membeli komoditas dari Azerbaijan berupa minyak bumi, gas alam, produk plastik, aluminium, dan produk-produk kimia (Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey, 2011). Dari semua kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan ini permintaan Turki kepada Azerbaijan terhadap gas alam sangat tinggi. Oleh karena itu, Turki dan Azerbaijan melakukan kerja sama dalam bidang ekonomi khususnya energi.



Gambar 2.4 Konsumsi Gas Alam Berdasarkan Sektor di Turki
(Ministry of Energy and Natural Resources Republic of Turkey, 2021)

Merujuk pada Gambar 2.4, tingginya permintaan Turki akan gas alam digunakan oleh berbagai sektor di dalam negeri. Berdasarkan tabel

diatas menunjukkan bahwa gas alam ini digunakan oleh sektor konversi (25%), jasa industri (10%), perumahan (32%), kilang minyak (4%), industri (27%), transportasi (1%), dan lain-lain (1%). Dari semua sektor ini dapat dilihat bahwa sektor perumahan, industri, dan konversi menjadi salah satu sektor yang dominan menggunakan gas alam. Gas alam menjadi sangat penting bagi Turki karena negara ini mengalami peralihan dari yang sebelumnya negara agrikultur berubah menjadi negara industri (Hikmata & Syauqillah, 2019:200). Adanya permintaan yang tinggi dari sektor-sektor tersebut dan peralihan ini mengakibatkan Turki sangat bergantung pada gas alam. Singkat kata, Turki harus bisa mengamankan keamanan energi di dalam negeri.



Gambar 2.5 Rute *Trans Anatolian Natural Gas Pipeline* (TANAP)
(Ministry of Energy of The Republic of Azerbaijan, 2020)

Merujuk pada gambar 2.5, pentingnya kebutuhan akan gas alam mendorong Turki untuk membuat proyek pipa gas yang bernama *Trans Anatolian Natural Gas Pipeline* (TANAP). TANAP merupakan hasil

kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Turki dan Azerbaijan pada 24 Desember 2011 (TANAP, 2018). Nama lain dari pipa TANAP dikenal sebagai pipa *Shah Deniz II*. Pipa ini secara paralel melanjutkan pipa gas alam *Shah Deniz I/South Caucasus Pipeline* (SCP). Selain itu, TANAP memiliki panjang 1.850 km yang dimulai dari wilayah Ardahan Posof (Turki) hingga membentang sampai wilayah Edirne Ipsala (Turki). Secara resmi, TANAP menyalurkan gas alam dari Azerbaijan ke Turki pada 30 Juni 2018 (Ministry of Energy of The Republic of Azerbaijan, 2020). Pipa ini akan menyalurkan gas alam dari Azerbaijan ke Turki sebanyak 6,0 *Bank Cubic Metre* (BCM) (Hikmata & Syauqillah, 2019:205). Melalui kerja sama TANAP ini hubungan Turki dan Azerbaijan mencapai posisi yang strategis dalam bidang ekonomi. Penting untuk digarisbawahi, mutualisme yang dihasilkan dari perdagangan gas alam antara Turki dan Azerbaijan dapat memperkuat keamanan energi dan hubungan kedua negara tersebut.

Berikutnya, hubungan antara Turki dan Azerbaijan berkembang dalam aspek militer. Dalam hal ini, Hubungan militer antara Turki dan Azerbaijan dijalin saat kedua negara ini menandatangani pelatihan militer bersama pada tahun 1992 (Oztarsu, 2011:2). Penandatanganan ini sebagai bentuk Turki untuk memperkuat postur militer Azerbaijan dalam menghadapi konflik Nagorno-Karabakh pasca peristiwa pembantaian di Kota Khojaly. Lebih dari itu, Turki juga mendirikan kantor manajemen militer di Baku, Azerbaijan (Aliyev, 2012:29). Kantor ini diduduki oleh

perwira dan pelatih militer dari Turki. Perwira dan pelatih militer dari Turki ini berkolaborasi dengan militer Azerbaijan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan militer kepada para perwira di Akademi Militer Baku, Azerbaijan (Cornell et al., 2004:59). Secara khusus, Turki memberikan pendidikan dan pelatihan di akademi ini sesuai dengan standar *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) (Cornell et al., 2004:59). Pada dasarnya, Turki merupakan anggota NATO, sehingga dengan keanggotaan ini Turki memiliki bekal pendidikan dan pelatihan dari NATO. Dengan demikian, Turki menerapkan standar NATO di Akademi Militer Azerbaijan, sehingga lulusan perwira militer di akademi ini memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan NATO.

Hubungan militer antara Turki dan Azerbaijan semakin diperkuat dalam perdagangan senjata. Turki menjadi salah satu pemasok utama senjata bagi Azerbaijan. Azerbaijan telah mengimpor senjata dari Turki sebesar 3,2% pada tahun 2015-2019 (SIPRI, 2020:6). Selama periode ini Azerbaijan mengimpor senjata dari Turki berupa kendaraan patroli lapis baja, artileri roket, rudal, dan *Unnamed Aerial Vehicle* (UAV) Bayraktar-TB2 (SIPRI, 2021). Disisi lain, dalam stratifikasi kekuatan militer, Turki juga lebih unggul dari Azerbaijan. Hal ini dibuktikan dengan kekuatan militer Turki yang berada di peringkat ke-11 dunia dibawah Azerbaijan yang menempati posisi ke-63 (Lisbet, 2020:9) (Global Fire Power, 2022). Dengan peringkat kekuatan militer Azerbaijan yang dibawah justru mendorong Turki untuk menjual senjata

dan membantu Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Dengan adanya perdagangan senjata dan bantuan dari Turki, maka postur kekuatan militer Azerbaijan bisa semakin meningkat. Peningkatan kekuatan militer Azerbaijan menjadi catatan penting bagi Armenia karena dapat mengancam posisinya dalam konflik Nagorno-Karabakh. Oleh karena itu, Turki menjadi salah satu aktor yang berkontribusi dalam mendukung keamanan Azerbaijan di wilayah Kaukasus Selatan terutama dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Hubungan antara Turki dan Azerbaijan memiliki kaitan yang sangat erat dalam konflik Nagorno-Karabakh. Turki memiliki kepentingan dalam mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Kepentingan ini ada karena Turki dan Azerbaijan menganut prinsip *one nation, two states*. Prinsip ini memungkinkan kedua negara untuk saling membantu dalam berbagai aspek termasuk konflik. Lebih dari itu, prinsip ini juga mempererat hubungan Turki dan Azerbaijan karena kesamaan agama dan budaya. Dengan begitu, adanya prinsip *one nation, two states* mendorong Turki untuk mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Ditambah lagi, dukungan ini juga diperkuat dengan hubungan mutualisme antara Turki dan Azerbaijan dalam aspek ekonomi dan militer. Oleh karena itu, kaitan antara hubungan Turki dan Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh ialah adanya prinsip *one nation, two states* dan hubungan ekonomi-militer antar kedua negara

yang mendorong Turki untuk berpihak kepada Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh.

2.4 Partai AKP (*Adalet ve Kalkynma Partisi*) dalam Pengambilan Kebijakan

Luar Negeri Turki

Partai AKP (*Adalet ve Kalkynma Partisi*) berhasil masuk ke dalam tampuk kekuasaan pemerintah Turki pada abad ke-21. Dalam hal ini, Partai AKP sering dikenal sebagai Partai Keadilan dan Pembangunan. Partai AKP didirikan oleh Recep Tayyip Erdoğan pada 14 Agustus 2001 (Arianto, 2019:61). Di Turki, partai ini sering disebut sebagai AK Parti, dengan filosofis kata AK yang berarti bersih, cahaya, murni, dan tidak terkontaminasi (Yavuz, 2009:1). Di usia yang masih terbilang muda Partai AKP langsung terjun dalam pemilihan umum di Turki pada tahun 2002. Keikutsertaan partai ini di dalam pemilihan umum tersebut membuat Partai AKP dapat memenangkan pemilu pada 3 November 2002 (Carkoglu, 2002:30). Partai AKP bisa menang pemilu dikarenakan gagasan-gagasan yang dibawa oleh partai ini berkorelasi dengan situasi Turki pada saat itu. Gagasan-gagasan yang dimaksud ialah pesan damai, gagasan yang moderat dan reformis yang mengacu pada demokrasi, serta gagasan yang memprioritaskan masalah masyarakat Turki (Cinar, 2006:473). Gagasan-gagasan yang dibawa ini mengetuk hati masyarakat Turki. Dengan demikian, Partai AKP dapat memenangkan pemilihan umum dengan hasil perolehan suara yang memuaskan.

Partai AKP (*Adalet ve Kalkynma Partisi*) memiliki hasil perolehan suara yang paling tinggi dari partai-partai lainnya pada pemilu tahun 2002.

Perolehan suara yang mengantarkan kemenangan Partai AKP dalam pemilu tersebut ialah sebesar 34,28% suara (Carkoglu, 2002:32). Melalui kemenangan ini, maka Partai AKP berhak atas 66% suara di parlemen atau secara spesifiknya mendapatkan kursi sebanyak 363 kursi dari total 550 kursi parlemen yang tersedia. Lebih dari itu, Partai AKP juga memenangkan pemilihan umum secara berturut-turut pada tahun 2007, 2011, 2015, dan 2018. Kemenangan Partai AKP yang berturut-turut ini membawa partai tersebut dapat menguasai pemerintahan Turki hingga saat ini. Mayoritas pengamat melihat bahwa kemenangan Partai AKP yang berturut-turut dalam pemilihan umum disebabkan oleh keberhasilan partai ini dalam menunjukkan citra yang baik sebagai partai yang tidak melakukan korupsi dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan sosial-ekonomi di Turki (Fiansyah & Basyar, 2013). Adanya keberhasilan ini membuat Partai AKP dipercaya oleh masyarakat Turki. Oleh karena itu, Partai AKP memiliki performa kinerja yang bagus dalam mewarnai politik di Turki.

Kinerja Partai AKP (*Adalet Ve Kalkynma Partisi*) yang bagus dipengaruhi oleh ideologi yang dianut partai tersebut. Partai AKP menganut ideologi demokratis-konservatif (Rimta, 2021:46). Secara spesifik, istilah demokratis mengarah kepada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pasar bebas, pluralisme, dan supremasi hukum (AK Parti, 2012:4-5). Sebaliknya, istilah konservatif maksudnya bahwa ideologi ini menekankan pada nilai-nilai tradisional Turki yang religius, seperti identitas nasional, kebanggaan sejarah, dan moralitas (AK Parti, 2012:4-5). Adanya ideologi demokratis-konservatif

mendorong partai AKP menekankan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Turki dengan sifat yang lebih demokratis. Untuk mempertegas hal ini Partai AKP melakukan penguatan terhadap kontrol sipil, hak asasi manusia, kaum minoritas, dan penguatan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, serta berserikat (Aydin & Cakir, 2007:2-3). Disisi lain, ideologi demokratis-konservatif yang dianut oleh Partai AKP membuat partai ini menolak agenda-agenda Islamis. Artinya, Partai AKP bukan sebuah partai agama Islam, tetapi religiusitas menjadi pegangan penting bagi para anggotanya. Singkat kata, Partai AKP tidak menjustifikasi agama Islam dalam agenda perpolitikannya melainkan peningkatan ekonomi dan penegakan demokrasi sebagai kunci agenda perpolitikannya di Turki.

Dalam menjalankan agenda utama Partai AKP (*Adalet Ve Kalkynma Partisi*) ada tokoh yang paling berpengaruh dibelakangnya. Sosok Recep Tayyip Erdoğan menjadi salah satu aktor yang paling berpengaruh tersebut. Recep Tayyip Erdoğan atau lebih dikenal dengan Erdoğan memiliki karir yang gemilang selama menjamah dunia perpolitikan di Turki. Di dalam dunia perpolitikan, Erdoğan telah menjabat sebagai Perdana Menteri Turki dan saat ini sedang menjabat sebagai Presiden di Turki. Erdoğan menjabat sebagai Perdana Menteri Turki pada periode 2003-2014 dan menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014 hingga saat ini (Haryanto et al., 2019:98-99). Kehadiran Erdoğan di dalam tampuk kekuasaan pemerintah memberikan perubahan yang baru terhadap sistem politik di Turki. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan Erdoğan yang lebih moderat, yaitu memusatkan

kebijakannya pada masalah ekonomi dan demokrasi di dalam urusan dalam negeri. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Erdoğan terkait ekonomi dan demokrasi mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Turki. Penting untuk digarisbawahi bahwa Presiden Erdoğan tidak hanya memberikan pembaharuan pada perpolitikan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

Pembaharuan politik yang dilakukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dalam urusan luar negeri cukup menonjol. Dalam hal ini, menurut keterangan wawancara penelitian skripsi bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I. M.A. Ph.D bahwa:

“...Turki tidak lepas dari pemimpinnya, Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan sejak 2003 menjabat sebagai Perdana Menteri Turki, kemudian sejak 2014 menjabat sebagai Presiden Turki. Erdoğan membuat kebijakan luar negeri Turki menjadi lebih konsisten sejak menjabat sebagai Perdana Menteri hingga Presiden di Turki. Konsisten yang dimaksud ialah Turki ingin menjadi pemain penting di kawasan. Implikasi dari kebijakan luar negeri Turki yang konsisten merupakan hasil ide yang berasal dari Erdoğan. Hal ini dikarenakan Erdoğan memiliki kekuatan yang sangat besar dari posisinya sebagai ketua Partai AKP. Berikutnya, ide-ide yang berasal dari Erdoğan menjadi suatu landasan bagi para pembantunya. Dalam hal ini, menteri luar negeri Turki hanya sebagai pelaksana saja dari ide-ide Erdoğan. Dengan kata lain, inisiator ide dari kebijakan luar negeri Turki berasal dari presiden, presiden inginnya apa, menteri itu hanya membantu melaksanakan keinginan dari presiden...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, semua tindakan pengambilan kebijakan luar negeri Turki di bawah pemerintahan Partai AKP dipengaruhi oleh Presiden Erdogan. Dengan kata lain, aspek ide dan ideologis dari Presiden Erdogan menjadi landasan kebijakan luar negeri Turki. Keberadaan

Partai AKP dan Erdoğan membawa perubahan dalam urusan luar negeri, yaitu Turki lebih aktif dalam merespon situasi atau isu-isu global. Situasi atau isu-isu global yang semakin berkembang mendorong Turki agar bisa memposisikan dirinya dengan baik. Dengan demikian, Presiden Erdoğan memiliki pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Turki dalam merespon situasi dunia internasional.

Pertimbangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dalam mengambil kebijakan luar negeri didasarkan pada aspek ideologis dan idenya. Terkait aspek ideologis, menurut keterangan wawancara penelitian Skripsi dari Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I. M.A. Ph.D bahwa:

“...Pertama dari sisi ideologis, kebijakan-kebijakan dari Erdoğan sering menggunakan narasi kesamaan identitas. Dalam hal ini, ketika Erdoğan membela Palestina dikarenakan Palestina saudara kita. Kemudian, ketika terjadi peristiwa di Myanmar, yaitu orang rohingya di persekusi, Erdoğan juga menyampaikan narasi yang sama bahwa ada penyiksaan dan persekusi oleh etnis Myanmar terhadap Rohingya (Muslim). Selanjutnya, ditengah-tengah ini Erdoğan juga menyuarakan *global injustice*. *Global injustice* dapat dilihat sebagai bentuk untuk membela value bahwa masih banyak yang mendapatkan *injustice*. Oleh karena itu, Erdoğan melihat bahwa orang-orang yang terdampak dari ketidakadilan harus kita bela. Narasi-narasi ini disuarakan dalam aspek internasional...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, Presiden Erdoğan mempertimbangkan aspek kesamaan identitas dan *global injustice* dalam memutuskan sebuah kebijakan luar negeri. Selain itu, aspek-aspek ini juga menjadi pegangan dari Presiden Erdoğan dalam melihat situasi dunia internasional. Oleh karena itu, pertimbangan ideologis ini juga diperkuat oleh aspek ide dari Presiden Erdoğan.

Pertimbangan dalam aspek ideologis juga dilengkapi dengan pertimbangan ide dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Terkait aspek ide, berdasarkan keterangan wawancara penelitian Skripsi dari Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I. M.A. Ph.D bahwa:

“...ide-ide yang berasal dari Erdoğan menjadi suatu landasan bagi para pembantunya. Dalam hal ini, menteri luar negeri Turki hanya sebagai pelaksana saja dari ide-ide Erdoğan. Dengan kata lain, inisiator ide dari kebijakan luar negeri Turki berasal dari presiden, presiden inginnya apa, menteri itu hanya membantu melaksanakan keinginan dari presiden...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, semua kebijakan luar negeri Turki berasal dari ide Presiden Erdoğan. Ide dari Presiden Erdoğan memegang peranan penting dalam mengambil tindakan kebijakan luar negeri Turki. Sebelumnya, kebijakan luar negeri Turki dipandu oleh doktrin *strategic depth* yang didesain oleh anggota Partai AKP sekaligus mantan perdana menteri Turki (2014), yaitu Ahmet Davutoğlu. Menurut keterangan wawancara penelitian Skripsi dari Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I. M.A. Ph.D bahwa:

“...jadi doktrin itu memang memandu Turki untuk mensukseskan misinya di Timur Tengah sebetulnya, itu kan di desain oleh Ahmet Davutoğlu. Harapannya duluan Turki itu mampu meng-*handle* Timur Tengah secara keseluruhan, tetapi setelah Arab Spring itu gagal. Pada akhirnya, Davutoğlu berpisah dengan Erdoğan. Davutoğlu mendirikan partai sendiri, sehingga Turki saat ini lebih back to Erdoğan. Jadi, kebijakan-kebijakan itu kembali ke pikiran Erdoğan. Jadi, Erdoğan mau apa, jadi kebijakannya lebih seperti itu...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, doktrin *strategic depth* tidak digunakan lagi dalam memandu kebijakan luar negeri Turki. Dengan begitu, doktrin ini tidak relevan dalam melihat suatu tindakan kebijakan luar negeri

Turki yang diambil saat ini. Singkat kata, pengambilan kebijakan luar negeri Turki dibawah kekuasaan Partai AKP (*Adelet ve Kalkinma Partisi*) tidak lagi dipengaruhi oleh doktrin *strategic depth*, tetapi dipengaruhi oleh aspek ide dan ideologis dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dalam mengambil kebijakan luar negeri dapat dilihat dari responnya terhadap konflik Nagorno-Karabakh. Presiden Erdoğan dan Partai AKP-nya memiliki fokus terhadap wilayah Asia, Kaukasus Selatan, dan Timur Tengah dalam urusan kebijakan luar negeri Turki (Rabasa & Larrabee, 2008:75). Dalam hal ini, wilayah Kaukasus Selatan mendapat perhatian dari Presiden Erdoğan karena adanya konflik Nagorno-Karabakh. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut Presiden Erdoğan memiliki kepentingan untuk mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Dalam menanggapi konflik ini Presiden Erdoğan mendukung Azerbaijan dan berusaha memfasilitasi penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh di meja perundingan saat konflik Nagorno-Karabakh berlangsung pada 27 September 2020 (Isachenko, 2020:1). Ditambah lagi, Presiden Erdoğan ingin membuka pintu untuk Rusia guna menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh secara bersama-sama (Isachenko, 2020:1). Apabila disimpulkan bahwa peran yang ingin ditonjolkan oleh Presiden Erdoğan dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah mendukung Azerbaijan sekaligus menawarkan proses perdamaian kepada Rusia untuk menyelesaikan konflik tersebut. Peran ini kemudian termanifestasi dalam kebijakan luar negeri Turki berupa dukungan diplomatik terhadap Azerbaijan dan proses perdamaian

bersama Rusia dalam kerja sama Pusat Gabungan Turki-Rusia. Penting untuk digarisbawahi bahwa Presiden Erdoğan memiliki cara yang pragmatis dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh.